

**REALISASI KONSEP *BLUE ECONOMY* DALAM
MENGATASI PROBLEMATIKA MASYARAKAT WILAYAH
PESISIR**

**(Studi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung)**

(SKRIPSI)

Oleh

WAHYU PUTRA SANTOSO

2016011063



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**REALISASI KONSEP *BLUE ECONOMY* DALAM
MENGATASI PROBLEMATIKA MASYARAKAT WILAYAH
PESISIR**

**(Studi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

WAHYU PUTRA SANTOSO

2016011063

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

REALISASI KONSEP *BLUE ECONOMY* DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA MASYARAKAT WILAYAH PESISIR (Studi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)

Oleh :

WAHYU PUTRA SANTOSO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap konsep Blue Economy, mengkaji realisasinya dalam pembangunan pesisir, serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Blue Economy masih terbatas secara konseptual, meskipun nilai keberlanjutan telah dipraktikkan dalam aktivitas ekonomi pesisir. Realisasi konsep tersebut belum optimal karena keterbatasan fasilitas, akses permodalan, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Hambatan-hambatan ini memengaruhi upaya pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dan dukungan kelembagaan yang sinergis diperlukan untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir.

Kata kunci: *Blue Economy*, Pembangunan Keberlanjutan, Realisasi, Wilayah Pesisir.

ABSTRACT

REALIZATION OF THE BLUE ECONOMY CONCEPT IN ADDRESSING THE PROBLEMATIC OF COASTAL COMMUNITIES (A Study in Sukaraja Village, Bumi Waras District, Bandar Lampung City)

By :

WAHYU PUTRA SANTOSO

This study aims to analyze community understanding of the Blue Economy concept, examine its realization in coastal development, and identify the obstacles to its implementation in Sukaraja Subdistrict, Bumi Waras District, Bandar Lampung City. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that community understanding of the Blue Economy remains conceptually limited, although sustainability values have been intuitively practiced in coastal economic activities. The realization of the concept has not been optimal due to limited facilities, restricted access to capital, and weak institutional coordination. These obstacles affect efforts to achieve sustainable coastal development. The study concludes that strengthening community economic capacity and improving institutional synergy are essential to support sustainable coastal resource management.

Keywords: *Blue Economy, Sustainable Development, Realization, Coastal Area*

Judul Skripsi : **REALISASI KONSEP *BLUE ECONOMY* DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA MASYARAKAT WILAYAH PESISIR (Studi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Putra Santoso**

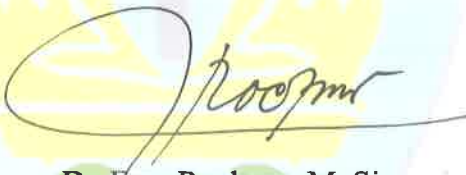
Nomor Pokok Mahasiswa : **2016011063**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

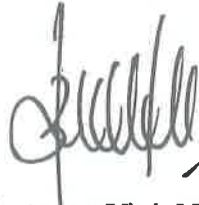
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Dr. Erna Rochana, M. Si
NIP. 19670623 199802 2 001

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si
NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Erna Rochana, M. Si



Penguji Utama

: Dra. Anita Damayantie, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Desember 2025

PERNYATAAN

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebagai upaya mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung ataupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian dari saya sendiri, tanpa campur tangan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebelumnya, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan terdapat pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Putra Santoso

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wahyu Putra Santoso, lahir di Kota Metro, Kecamatan Metro Selatan pada tanggal 18 Mei 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sareh dan Ibu Ratna Widowati. Penulis berkebangsaan Indonesia dengan suku Jawa dan beragama Islam.

Pendidikan yang ditempuh penulis antara lain :

1. Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal yang diselesaikan pada tahun 2008.
2. SD Negeri 5 Metro Barat yang diselesaikan pada tahun 2014.
3. SMP Kartikatama Metro yang diselesaikan pada tahun 2017.
4. SMA Negeri 3 Metro yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Dalam menjalani perkuliahan penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan UKM-F Forum Studi Pengembangan Islam. Pada tahun 2023, penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) gelombang 1 di Desa Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya penulis mengikuti program magang MBKM FISIP di Balai Pemerintahan Desa di Lampung Kementerian Dalam Negeri selama 6 bulan, mulai dari bulan Februari-bulan Juli tahun 2023. dan di BTPN Syariah selama kurang lebih 12 bulan, mulai bulan Agustus tahun 2023-Agustus tahun 2024.

MOTTO

“ Nothing last forever, we can change the future ”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil 'Alamin

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat iman yang sangat luar biasa, memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan pembelajaran disetiap proses menuju gelar sarjana sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terimakasih dan kasih sayang kepada:

Keluargaku

Teruntuk ayah dan ibu serta kakak dan adikku, rasa bangga dan syukur menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa – doa yang dipanjatkan, terimakasih atas kepedulian serta kasih sayang serta pemberian semangat selama penulis hidup di dunia ini.

Dosen

Terimakasih kepada seluruh Dosen Jurusan Sosiologi atas Ilmu dan pengalaman yang luar biasa selama masa perkuliahan. Terkhusus kepada Ibu Dr. Erna Rochana, M. Si selaku dosen pembimbing dan Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. sebagai dosen penguji skripsi.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi Islam dengan hikmah-hikmah darinya. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Realisasi Konsep *Blue Economy* dalam Mengatasi Problematika Masyarakat Wilayah Pesisir (Studi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya mendapatkan bantuan materi, motivasi, doa, kritik dan saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga melalui skripsi ini, penulis dengan penuh kehormatan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dengan segala nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bahagia serta pertolongan dalam kehidupan penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tuaku, ayah dan ibu. Terimakasih atas semua doa tulus yang selalu dipanjatkan untuk hidupku, terimakasih atas kebahagiaan serta kerja keras yang diperjuangkan untuk hidupku, terimakasih atas semua motivasi untukku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta mendapat sarjana sosiologi.
3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.

6. Ibu Dr. Erna Rochana, M. Si. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabaran dan ketelitian ibu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak atas ilmu yang ibu dan bapak berikan kepada penulis, serta terimakasih banyak atas ketersediaan waktu ibu untuk proses penyelesaian skripsi penulis.
7. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu, kritik, saran, dukungan, dan arahan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi yang telah membantu saya dalam masa studi perkuliahan, terimakasih atas ilmu dan waktunya.
9. Mas Edi dan Mas Darman selaku staff administrasi jurusan sosiologi yang telah membantu saya selama masa perkuliahan hingga menuju wisuda.
10. Untuk kakakku Listiana Safitri dan Yulia Puspitasari terimakasih atas doa, semangat, serta motivasi. Untuk adikku, Muhammad Ridho Sasongko terimakasih atas doa, semangat, serta hiburan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Keluarga besar dan Tetangga yang menantikan keulusanku.
12. Adelia Azahra selaku sahabat hidupku. Terimakasih atas semua doa, semangat, dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini dengan baik.
13. Rohmad Maulana selaku teman seperjuangan penulis. Terimakasih atas tempat singgah dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi sampai selesai.
14. Untuk *Faux Society* terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
15. Rekan Kerja *Kitchen Team Faux Society*, Amanda Riki Sadewa, Andhika Aji Setiawan, dan Dhiva Harisna Prih Wibowo terimakasih atas dukungan serta penyemangat selama penulis menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman perkuliahan Sosiologi angkatan 2020. Terimakasih sudah berjalan bersama penulis dalam suka maupun duka.
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari materi pembahasan, cara penulisan dan bahasa yang kurang dimengerti. Untuk itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun. Penulis berharap semoga dengan rahmat dan izin Allah SWT Skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Penulis,

Wahyu Putra Santoso

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Realisasi Konsep Blue Economy	12
2.2 Tinjauan Tentang Wilayah Pesisir dan Sumber Daya Pesisir	14
2.2.1 Definisi dan Batasan Wilayah Pesisir	14
2.2.2 Karakteristik Wilayah Pesisir	16
2.2.3 Masyarakat Pesisir	16
2.3 Sumber Daya Pesisir	17
2.3.1 Konservasi dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir	18
2.4 Tinjauan Tentang Konsep <i>Blue Economy</i>	19
2.4.1 Pengertian <i>Blue Economy</i>	19
2.4.2 Dinamika <i>Blue Economy</i> serta Hambatan Implementasi.....	22
2.4.3 Pemahaman Masyarakat Pesisir terhadap Konsep <i>Blue Economy</i>	24
2.5 Tinjauan Tentang Problematika Wilayah Pesisir	26
2.6 Landasan Teori Struktural Fungsional.....	28
2.7 Penelitian Terdahulu	30
2.8 Kerangka Berpikir	33
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian	36
3.5 Sumber Data.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6.1 Wawancara Mendalam	39

3.6.2 Observasi	39
3.6.3 Dokumentasi	40
3.7 Teknik Analisis Data	41
IV. GAMBARAN UMUM	43
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Sukaraja	43
4.1.1 Sejarah Kelurahan Sukaraja	43
4.1.2 Kependudukan di Kelurahan Sukaraja	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Hasil Penelitian.....	50
5.1.1 Profil Informan Penelitian.....	50
5.1.1.1 Informan 1	50
5.1.1.2 Informan 2	51
5.1.1.3 Informan 3	51
5.1.1.4 Informan 4	51
5.1.1.5 Informan 5	51
5.1.1.6 Informan 6	52
5.1.2 Kondisi Ekonomi, Ekologi, dan Sosial Wilayah Pesisir Sukaraja ..	52
5.1.2 Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep <i>Blue Economy</i>	63
5.1.3 Realisasi <i>Blue Economy</i> di Wilayah Pesisir Kelurahan Sukaraja ..	68
5.1.4 Hambatan Realisasi <i>Blue Economy</i>	71
5.1.5 Strategi Penanganan Problematika	73
5.2 Pembahasan.....	77
5.2.1 Analisis Teori Berdasarkan Pendekatan Struktural Fungsional	77
5.2.2 Analisis Realisasi Konsep <i>Blue Economy</i>	79
5.2.3 Analisis Kesenjangan antara Pemahaman dan Realisasi	83
VI. PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Perkembangan Penduduk Miskin, 2022.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 5.1 Kondisi Lingkungan Pesisir Kelurahan Sukaraja	58
Gambar 5.2 Kesenjangan Realisasi	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data produksi perikanan tangkap di Indonesia, 2020-2022	2
Tabel 2.1 Sektor sumber daya pesisir	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Informan dalam penelitain	37
Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data.....	41
Tabel 4.1 Data Penduduk Sukaraja Berdasarkan Umur.....	44
Tabel 4.3 Data Pendidikan Penduduk di Kelurahan Sukaraja	44
Tabel 5.1 Data Informan Penelitian.....	50
Tabel 5.3 Data Infrastruktur	53
Tabel 5.4 Tabel Harga Jual Ikan di Kelurahan Sukaraja Tahun 2024.....	56
Tabel 5.5 Problematika di Kelurahan Sukaraja Tahun 2024	61
Tabel 5.6 Matriks Pemahaman konsep <i>Blue Economy</i>	66
Tabel 5.7 Matriks Realisasi Masyarakat terhadap <i>Blue Economy</i>	70
Tabel 5.4 Matriks Strategi Penanganan Problematika	75

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri 17.504 pulau dengan luas lautan sebesar 6,4 juta km² jauh lebih luas dari luas daratan Indonesia. Luasnya lautan Indonesia membuat potensi kekayaan sumber daya laut bangsa ini. Secara global, urutan negara penghasil produk perikanan paling besar kedua ditempati oleh Indonesia setelah Tiongkok. Keuntungan ini diperoleh karena lautan Indonesia terletak pada Segitiga Terumbu Karang (coral triangle) (BPS Sumber Daya Laut dan Pesisir, 2022). Namun, Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di Indonesia dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan, beberapa wilayah pesisir terindikasi degradasi fisik habitat pesisir, abrasi pantai, pencemaran ekosistem, masyarakat dengan ekonomi rendah dan terlampaunya daya dukung atau kapasitas keberlanjutan dari ekosistem telah muncul di beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Sebagai wilayah peralihan antara darat dan laut yang memiliki beragam ekosistem dan sangat produktif yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi manusia, maka dari itu seharusnya wilayah pesisir menjadi daerah yang sangat diperhatikan keberlanjutannya dengan menjaga ekosistem yang ada agar tetap lestari serta merawat daerah tersebut dengan baik karena akan berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat yang merupakan hasil dari hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan.

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi sumber daya pesisir dan kelautan yang sangat besar, terutama pada sektor perikanan, pariwisata bahari, dan jasa lingkungan. Sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.

Namun demikian, besarnya potensi sumber daya pesisir tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbagai data nasional menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pesisir cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah non-pesisir. Masyarakat pesisir masih dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta sumber daya ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi sumber daya alam yang tersedia dengan kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya tersebut.

Tabel 1.1 Data Produksi Perikanan Tangkap di Lampung, 2020-2022

Wilayah	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
	Perikanan Laut		
	2020	2021	2022
Lampung Timur	45,658	43,391	66,623
Tanggamus	26,529	26,191	25,246
Tulang Bawang	22,336	24,437	24,776
Pesawaran	15,636	165	10,725
Lampung Selatan	13,831	30,255	22,998
Bandar Lampung	5,012	2,890	2,424
Pesisir Barat	4,258	17	1,620
Mesuji	2,562	2,788	5,360
Lampung Tengah	1,583	1,913	3,188
Lampung Barat	-	-	-
Lampung Utara	-	-	-
Metro	-	-	-
Pringsewu	-	-	-
Tulang Bawang Barat	-	-	-
Way Kanan	-	-	-
Jumlah	136,750	132,047	162,960

Sumber : *Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2022*

Paradigma kepemilikan bersama terhadap sumber daya perikanan masih mendominasi cara pandang para nelayan dan lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam sektor penangkapan ikan. Minimnya data mengenai kondisi populasi ikan yang tersedia, ditambah dengan sistem akses terbuka tanpa batasan, membuat sumber daya perikanan rentan mengalami eksploitasi berlebihan. Meskipun laut menyimpan berbagai spesies ikan bernilai ekonomis tinggi, praktik penangkapan yang tidak terkendali perlu dicegah karena berpotensi membahayakan kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan populasi ikan itu sendiri.

Dilihat dari produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung pada tabel 1.1, beberapa wilayah di Lampung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan kondisi perairan yang mengalami degradasi dan berkurangnya stok ikan untuk memulihkan diri, sehingga ikan yang layak tangkap menurun disebabkan karena *overfishing* (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung, 2021). Akhirnya, hal ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat pesisir yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan bergantung pada sumber daya pesisir.

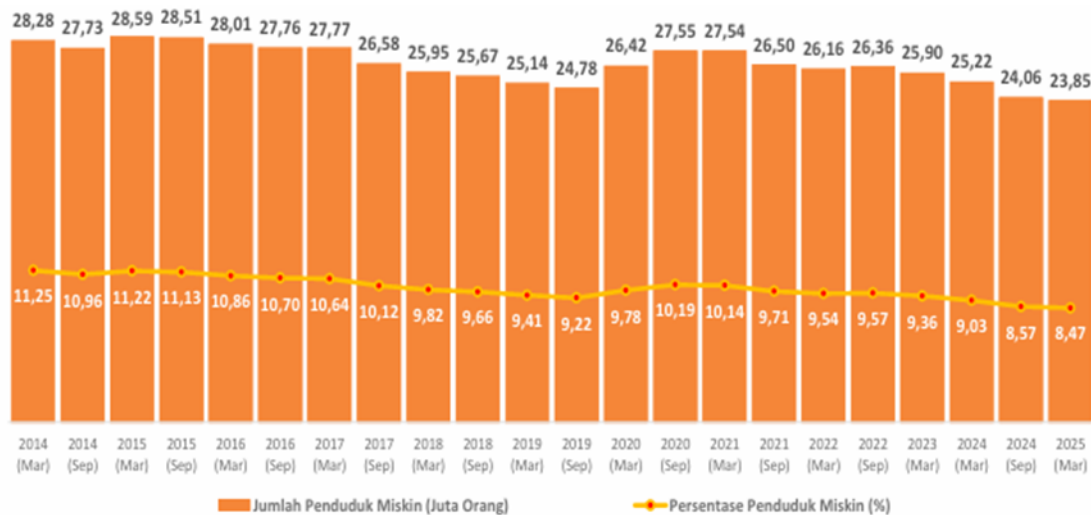
Selain persoalan sosial dan ekonomi, wilayah pesisir juga menghadapi tekanan ekologis yang semakin meningkat. Degradasi lingkungan pesisir seperti pencemaran laut, kerusakan ekosistem, abrasi pantai, dan penurunan kualitas perairan menjadi permasalahan yang kerap ditemukan di berbagai wilayah pesisir. Tekanan ekologis tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya produktivitas sumber daya perikanan dan mempersempit ruang hidup masyarakat pesisir. Dalam jangka panjang, degradasi lingkungan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, yang menjadi lokasi penelitian ini. Kelurahan Sukaraja merupakan wilayah pesisir perkotaan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada aktivitas kelautan dan perikanan, khususnya sebagai nelayan tradisional. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya pesisir menjadikan masyarakat di wilayah ini sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan dinamika ekonomi.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan temuan lapangan, masyarakat pesisir Kelurahan Sukaraja menghadapi berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Dari aspek lingkungan, pencemaran pesisir akibat sampah rumah tangga dan aktivitas permukiman masih menjadi persoalan utama. Penurunan kualitas perairan berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan, sementara abrasi pantai dan perubahan garis pesisir turut mengancam ruang aktivitas ekonomi serta

permukiman masyarakat. Kondisi lingkungan pesisir yang mengalami degradasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Perkembangan Penduduk Miskin, Maret 2014–Maret 2025



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2025*

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, proporsi masyarakat Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 4 persen, setara dengan 10,86 juta penduduk. Angka ini merupakan bagian dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 10,14 persen atau 27,54 juta orang. Kondisi kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir menunjukkan situasi yang lebih memprihatinkan dibanding daerah lain, dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang lebih besar. Persentase kemiskinan di zona pesisir tercatat 4,19%, melampaui angka rata-rata nasional. Dari keseluruhan populasi miskin ekstrem yang berjumlah 10,86 juta orang, sekitar 12,5 persen atau 1,3 juta di antaranya mendiami wilayah pesisir. Informasi ini dipaparkan oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin ketika memimpin pertemuan koordinasi mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir. Rapat tersebut diselenggarakan di Kantor Wakil Presiden yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

Kemerosotan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan sangat terasa di wilayah pesisir yang menghadapi masalah penangkapan ikan berlebihan (overfishing). Akibatnya, penghasilan yang diperoleh dari hasil tangkapan menjadi tidak stabil, sulit diprediksi, dan cenderung mengalami penurunan secara bertahap. Menghadapi kondisi seperti ini, keluarga nelayan harus menghadapi tiga tantangan utama yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Pertama, kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, hambatan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ketiga, minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap rumah tangga nelayan, namun seringkali sulit dipenuhi dengan baik. Realitas kehidupan semacam ini menyebabkan sulitnya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di komunitas nelayan. Padahal, peningkatan kualitas tersebut sangat diperlukan agar mereka mampu mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut secara maksimal. Ketika masyarakat nelayan tidak memiliki atau kurang memiliki daya kreativitas untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi di wilayahnya, mereka akan terjebak dalam kondisi keterbelakangan yang berkepanjangan. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat tercapainya target kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dari aspek ekonomi, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, bersifat tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi alam. Keterbatasan alat tangkap, minimnya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta akses pasar yang lemah menyebabkan masyarakat sulit meningkatkan nilai tambah hasil laut. Ketergantungan pada tengkulak semakin memperlemah posisi tawar nelayan dalam sistem ekonomi perikanan, sehingga keuntungan yang diperoleh cenderung rendah dan tidak sebanding dengan risiko kerja yang dihadapi.

Kondisi tersebut membentuk pola kemiskinan yang bersifat struktural di wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja. Kemiskinan masyarakat pesisir tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh struktur sosial dan ekonomi yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya, informasi, dan peluang ekonomi. Keterbatasan pendidikan, minimnya pendampingan, serta kebijakan

pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pesisir menyebabkan masyarakat berada dalam posisi marginal dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan fungsi dalam sistem sosial masyarakat pesisir. Lingkungan, ekonomi, dan struktur sosial merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Ketika fungsi lingkungan mengalami gangguan akibat degradasi, maka fungsi ekonomi dan sosial masyarakat juga ikut terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa problematika pesisir tidak dapat dipahami secara sektoral, melainkan harus dilihat sebagai persoalan struktural yang melibatkan interaksi antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

Secara ideal, wilayah pesisir seharusnya dikelola sebagai kawasan produktif yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan ekosistem, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, wilayah pesisir tidak hanya diposisikan sebagai ruang eksploitasi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Sebab itu diperlukan suatu sistem yang mengatur cara mengambil manfaat sumber daya laut dengan tetap menjaga lingkungan. Sistem ini mendukung kesejahteraan rakyat dan mata pencaharian untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus tetap menjaga kelestarian ekosistem laut atau yang dikenal sebagai ekonomi biru. Tidak hanya sektor perikanan yang ada dalam lingkup ekonomi biru, tapi juga termasuk sektor pariwisata, pengelolaan limbah, energi terbarukan, transportasi air serta mitigasi perubahan iklim.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan kondisi yang dialami masyarakat pesisir. Program pembangunan dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian

ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekologis.

Konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*) mengusung prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diterapkan untuk memulihkan kawasan pesisir yang sedang menghadapi degradasi. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi berbasis model keberlanjutan, sehingga mampu memberikan solusi berantai terhadap permasalahan di zona pesisir. Dokumen "*The Future We Want*" yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro 2012 menempatkan ekonomi biru sebagai fokus utama. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato bertajuk "*Moving Towards Sustainability: Together We Must Create the Future We Want*", menjelaskan bahwa Indonesia mengadopsi model ekonomi biru karena besarnya potensi maritim sebagai negara kepulauan. Hal ini menuntut upaya konservasi kekayaan laut demi menjamin ketersediaan pangan jangka panjang. Visi ini sejalan dengan misi ketujuh dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) periode 2005-2025, yang menetapkan target menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang tangguh, maju, dan berdaulat. Pencapaian tersebut akan diwujudkan melalui pengembangan ekonomi kelautan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berlandaskan kepentingan nasional (BPS Sumber Daya Laut dan Pesisir, 2022).

Dalam konsep Ekonomi Biru dengan mengelola sumber daya laut dan pesisir yang mengedepankan konsep berkelanjutan, maka setiap sektor dalam ekonomi biru mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ekonomi biru sendiri bermanfaat dalam menjaga kelestarian ekosistem lautan dan pesisir serta keanekaragaman hayati, menjamin mata pencaharian yang lestari dan berkelanjutan terutama bagi masyarakat pesisir. Di Indonesia Ekonomi Biru berupaya dikembangkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, dengan harapan dapat menjadi keuntungan bagi wilayah pesisir dalam pengembangan potensi sumber

daya alam serta menjadi solusi berbagai problematika yang saat ini terjadi pada wilayah pesisir.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan wilayah pesisir, termasuk di Kelurahan Sukaraja dan wilayah pesisir lainnya. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya pesisir merupakan isu yang saling berkaitan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa degradasi lingkungan pesisir berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan nelayan, sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan dukungan kelembagaan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek teknis dan kebijakan, serta belum secara mendalam mengkaji persoalan pesisir dari perspektif sosiologis yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu melihat bagaimana struktur sosial, relasi ekonomi, dan pemahaman masyarakat memengaruhi realisasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Konsep Blue Economy hadir sebagai salah satu pendekatan pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek ekologi, Blue Economy menekankan perlindungan ekosistem laut dan pengurangan dampak pencemaran serta eksploitasi berlebihan. Dalam aspek sosial, konsep ini menekankan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, dan akses terhadap sumber daya. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, Blue Economy mendorong terciptanya nilai tambah, diversifikasi mata pencaharian, dan pengembangan usaha berbasis sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

Namun, penerapan konsep Blue Economy tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan struktural masyarakat pesisir. Pemahaman masyarakat, pola mata pencaharian tradisional, serta keterbatasan akses terhadap modal dan kelembagaan menjadi

faktor penentu keberhasilan implementasi konsep tersebut. Tanpa adanya penguatan pada aspek sosial dan struktural, penerapan *Blue Economy* berpotensi hanya menjadi wacana kebijakan tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji pemahaman masyarakat pesisir terhadap konsep *Blue Economy*, realisasi penerapannya dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, serta berbagai problematika yang muncul dalam proses tersebut. Dengan menggunakan perspektif sosiologi dan pendekatan teori struktural fungsional, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat pesisir Kelurahan Sukaraja sebagai sebuah sistem sosial merespons dan menghadapi tantangan degradasi lingkungan, rendahnya kesejahteraan, dan kemiskinan struktural dalam kerangka pembangunan pesisir yang berkelanjutan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Realisasi Konsep *Blue Economy* Dalam Mengatasi Problematika Masyarakat Wilayah Pesisir (Studi Di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras Teluk Betung Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat pesisir memahami istilah *Blue Economy* sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan sumber daya alam laut dan pesisir, serta problematika yang muncul dalam pengelolaannya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana realisasi konsep *Blue Economy* dalam pembangunan berkelanjutan sumber daya alam laut dan pesisir, serta problematika apa saja yang muncul dalam proses penerapannya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung?
3. Apa hambatan realisasi konsep *Blue Economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti telah menentukan beberapa tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

1. Mengetahui pemahaman masyarakat pesisir terhadap istilah *Blue Economy* serta problematika yang muncul dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Kelurahan Sukaraja.
2. Menganalisis realisasi konsep *Blue Economy* dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan sumber daya pesisir serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam penerapannya di Kelurahan Sukaraja.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam realisasi konsep *Blue Economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sukaraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun penulis, baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi lingkungan dan pembangunan pesisir, khususnya dalam menganalisis konsep *Blue Economy* melalui pendekatan struktural fungsional. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara pemahaman masyarakat, realisasi kebijakan, dan strategi penanganan problematika dalam suatu sistem sosial pesisir. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam menjelaskan bagaimana keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial memengaruhi keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, dinas terkait, serta lembaga pemberdayaan masyarakat

dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan pesisir berbasis Blue Economy. Hasil analisis mengenai pemahaman masyarakat dan realisasi konsep di lapangan dapat menjadi dasar evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Sementara itu, strategi yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperkuat kapasitas ekonomi nelayan, meningkatkan koordinasi kelembagaan, serta membangun partisipasi sosial masyarakat pesisir secara lebih berkelanjutan. Bagi masyarakat pesisir Kelurahan Sukaraja, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara kolektif untuk mengatasi problematika pesisir, sehingga tercipta keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keharmonisan sosial dalam jangka panjang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Realisasi Konsep *Blue Economy* dalam Pembangunan Wilayah Pesisir

Konsep *Blue Economy* berkembang sebagai respon terhadap berbagai permasalahan wilayah pesisir yang ditandai oleh degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Secara konseptual, *Blue Economy* menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi (Pauli, 2010). Namun demikian, dalam praktiknya, realisasi *Blue Economy* di tingkat lokal tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana konsep normatif yang dikemukakan dalam literatur.

Realisasi *Blue Economy* dapat dipahami sebagai proses penerjemahan konsep pembangunan pesisir berkelanjutan ke dalam praktik kehidupan masyarakat pesisir. Menurut UNEP (2013), keberhasilan realisasi *Blue Economy* tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya laut, tetapi juga dari kemampuan suatu wilayah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara inklusif. Dengan demikian, realisasi *Blue Economy* harus dipandang sebagai proses multiaspekonal yang melibatkan interaksi antara sistem lingkungan, struktur sosial, dan aktivitas ekonomi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa realisasi *Blue Economy* di wilayah pesisir sering kali bersifat parsial dan tidak merata antar aspek. Studi yang dilakukan oleh Béné et al. (2016) mengungkapkan bahwa pendekatan pembangunan pesisir yang menitikberatkan pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan aspek sosial dan kelembagaan cenderung memperkuat kerentanan masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi *Blue Economy* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan struktur ekonomi yang melingkupi masyarakat pesisir.

Dalam konteks ekologi, realisasi *Blue Economy* berkaitan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut. Beberapa penelitian di wilayah pesisir Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan laut umumnya sudah mulai terbentuk, namun belum diikuti dengan praktik pengelolaan lingkungan yang terorganisir dan berkelanjutan (Satria, 2015). Kondisi ini menyebabkan degradasi lingkungan pesisir tetap berlangsung, meskipun masyarakat secara normatif memahami pentingnya kelestarian lingkungan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman dan realisasi dalam praktik.

Dari aspek sosial, realisasi *Blue Economy* sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan keberfungsian kelembagaan lokal. Menurut Chambers (1994), pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek utama cenderung gagal menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus wilayah pesisir, masyarakat masih diposisikan sebagai objek kebijakan, sementara pengambilan keputusan didominasi oleh aktor eksternal. Akibatnya, realisasi *Blue Economy* tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem sosial masyarakat pesisir.

Aspek ekonomi menjadi aspek yang paling kompleks dalam realisasi *Blue Economy*. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat pesisir pada sektor perikanan tangkap menyebabkan kerentanan ekonomi yang tinggi, terutama ketika kondisi lingkungan laut mengalami penurunan (Allison & Ellis, 2001). Upaya diversifikasi mata pencaharian dan penciptaan nilai tambah hasil laut sering kali terkendala oleh keterbatasan modal, akses pasar, dan pengetahuan teknis. Oleh karena itu, realisasi *Blue Economy* pada aspek ekonomi sering kali berjalan lebih lambat dibandingkan aspek ekologi dan sosial.

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, keterbatasan realisasi *Blue Economy* di wilayah pesisir juga berkaitan dengan kemiskinan yang bersifat struktural. Menurut Todaro dan Smith (2012), kemiskinan struktural terjadi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya produktif, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pesisir sulit keluar dari

lingkaran kemiskinan, meskipun berada di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Dalam konteks ini, *Blue Economy* seharusnya menjadi pendekatan yang mampu memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Beberapa penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa realisasi *Blue Economy* sangat bergantung pada sinergi antar aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian di wilayah pesisir Natuna dan Kepulauan Sangkarrang menunjukkan bahwa program berbasis *Blue Economy* yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kesadaran lingkungan (Sari et al., 2020). Namun, tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan pendampingan berkelanjutan, realisasi konsep tersebut cenderung berhenti pada tahap awal dan tidak berkelanjutan.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi *Blue Economy* merupakan proses yang kompleks dan kontekstual. Keberhasilan realisasi konsep ini tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alam, tetapi juga oleh kondisi sosial, struktur ekonomi, serta tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, analisis realisasi *Blue Economy* dalam penelitian ini difokuskan pada keterpaduan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam konteks wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja, sehingga mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana konsep *Blue Economy* telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat pesisir.

2.2 Tinjauan Tentang Wilayah Pesisir dan Sumber Daya Pesisir

2.2.1 Definisi dan Batasan Wilayah Pesisir

a. Definisi Wilayah Pesisir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kawasan pesisir diartikan sebagai zona transisi yang menghubungkan ekosistem daratan dengan ekosistem lautan, di mana karakteristiknya dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada kedua wilayah

tersebut. Sebagai area pertemuan antara daratan dan perairan, kawasan pesisir memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai habitat, permukiman, serta sumber penghidupan bagi masyarakat (Boy Anugerah, 2021).

b. Batasan Wilayah Pesisir

Supriharyono dalam bukunya yang terbit tahun 2019 menjelaskan bahwa zona pesisir merupakan area peralihan yang mencakup dua komponen utama. Pertama, bagian daratan yang karakteristiknya dipengaruhi oleh aktivitas kelautan seperti fluktuasi air pasang-surut, hembusan angin dari laut, serta infiltrasi air yang mengandung garam. Kedua, bagian perairan laut yang kondisinya terpengaruh oleh fenomena alamiah dari daratan seperti pengendapan material dan masuknya air tawar, termasuk dampak aktivitas manusia seperti deforestasi dan polusi.

Batas wilayah ke arah darat :

1. Ekologis : Meliputi zona daratan yang terpengaruh fenomena kelautan, termasuk fluktuasi pasang-surut dan penetrasi air laut ke dalam tanah.
2. Administratif : Ditentukan berdasarkan batas administrasi desa pesisir terjauh atau penetapan jarak tertentu dari garis pantai (misalnya 2-20 kilometer).
3. Perencanaan : Disesuaikan dengan isu spesifik yang menjadi prioritas pengelolaan. Untuk masalah polusi dan sedimentasi, batasnya mencakup wilayah yang dampaknya mempengaruhi area pesisir. Untuk ekosistem mangrove, batasnya adalah titik terjauh hutan bakau di sisi daratan.

Batas wilayah ke arah laut :

1. Ekologis : Mencakup perairan yang masih menerima pengaruh proses daratan (seperti aliran sungai, limpasan permukaan, dan air tanah) atau aktivitas manusia (polutan dan sedimen), serta wilayah landas kontinen.
2. Administratif : Ditetapan berdasarkan jarak tertentu dari garis pantai, seperti 4 mil laut atau 12 mil laut.
3. Perencanaan Disesuaikan dengan fokus pengelolaan. Untuk isu polusi dan sedimentasi, mencakup perairan yang terdampak pencemaran dari daratan. Untuk ekosistem mangrove, meliputi perairan yang masih mendapat kontribusi ekologis dari hutan bakau, seperti materi organik (*detritus*).

2.2.2 Karakteristik Wilayah Pesisir

Menurut Yonvitner, dkk, kawasan pesisir memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan kawasan lain. Secara umum, daerah pesisir ditandai dengan bentang alam yang relatif datar sehingga memudahkan pengembangan wilayah, serta memiliki aksesibilitas tinggi karena dapat memanfaatkan jalur laut sebagai sarana transportasi. Kawasan ini juga dikenal sebagai area yang melimpahkan kekayaan alam, baik yang berasal dari daratan maupun lautan, yang sangat diperlukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia.

Adapun ciri-ciri utama dari kawasan pesisir meliputi:

1. Termasuk wilayah dengan ekosistem paling produktif di dunia, seperti muara sungai, lahan basah, dan ekosistem terumbu karang
2. Memiliki keanekaragaman sumber daya biologis yang tinggi, termasuk hutan bakau, ekosistem karang, berbagai jenis ikan, serta potensi mineral dan bahan tambang
3. Mengalami pengaruh dari berbagai proses dinamika alam, seperti pengikisan pantai, penambahan sedimen, terjangan badai dan ombak, serta kenaikan muka air laut
4. Menjadi tempat hunian bagi sekitar tiga perempat populasi manusia di bumi
5. Diprediksi akan menampung sebagian besar pertumbuhan populasi global pada masa mendatang
6. Memiliki potensi strategis untuk berbagai fungsi, seperti pembangunan pelabuhan, kawasan industri, perkotaan, destinasi wisata, lokasi riset ilmiah, area pertanian, serta zona pengolahan limbah

2.2.3 Masyarakat Pesisir

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "masyarakat" merujuk pada sekumpulan manusia secara luas yang terhubung melalui kebudayaan yang dianggap sebagai milik bersama. Sementara itu, kata "pesisir" menurut UU No.27 tahun 2007 dijelaskan sebagai zona transisi yang menghubungkan ekosistem

daratan dengan ekosistem laut, dengan batas wilayah sejauh 12 mil ke arah laut dan hingga batas administratif kabupaten/kota ke arah darat, sehingga pesisir dapat dipahami sebagai kawasan peralihan di antara daratan dan lautan.

Berdasarkan definisi di atas, masyarakat pesisir dapat diartikan sebagai kelompok individu yang bermukim, tumbuh, dan menjalani kehidupan di kawasan transisi antara darat dan laut. Mereka menggantungkan hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui pemanfaatan potensi sumber daya laut dan pesisir sebagai basis ekonomi. Dengan demikian, masyarakat pesisir adalah komunitas yang berdomisili dan menjalankan berbagai kegiatan sosial-ekonomi yang berhubungan erat dengan kekayaan laut dan pesisir. Secara umum, profesi dominan masyarakat pesisir adalah nelayan dalam sektor perikanan, sementara di luar sektor perikanan, mereka bekerja sebagai penyedia jasa wisata, penyedia jasa transportasi, maupun kelompok lain yang mengeksploitasi sumber daya non-hayati laut dan pesisir untuk menunjang penghidupan mereka. Masyarakat pesisir umumnya telah berkembang menjadi komunitas yang plural namun masih menjunjung tinggi semangat solidaritas, yang berarti komposisi masyarakat pesisir rata-rata memadukan ciri-ciri masyarakat urban dan rural. Karena sifatnya yang plural, masyarakat pesisir mampu membangun sistem dan nilai budaya yang merupakan hasil perpaduan budaya dari berbagai komponen yang membentuk struktur komunitasnya (Sidik, 2022)

2.3 Sumber Daya Pesisir

Sumber daya alam merujuk pada berbagai komponen yang berasal dari lingkungan alami dan memiliki nilai guna bagi pemenuhan keperluan serta kelestarian kehidupan manusia. Di kawasan pesisir, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya yang memiliki kemampuan untuk memperbarui diri (renewable resources) dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (non-renewable resources). Kekayaan sumber daya alam di zona pesisir ini telah mendapatkan pengaturan hukum melalui Pasal 1 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan menyatakan bahwa: "Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan;

sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir."

Dewasa ini, kesadaran akan pentingnya potensi sumber daya kawasan pesisir semakin meningkat di kalangan masyarakat, khususnya bagi komunitas nelayan dan penduduk yang bermukim di area pesisir, karena dipandang sebagai peluang ekonomi yang sangat prospektif. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya pesisir yang melimpah ini belum dilaksanakan secara maksimal, baik oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh fokus pengelolaan dan strategi pembangunan yang masih cenderung berorientasi pada pengembangan wilayah daratan di pusat-pusat perkotaan. Akibatnya, potensi kawasan pesisir kurang mendapat perhatian memadai dan pengelolaannya belum terorganisir secara efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Tabel 2.1 Sektor Sumber Daya Pesisir

No	Sektor	Objek Kegiatan
1	- Konservasi - Taman suaka alam laut	- Rawa pesisir mangrove - Satwa liar yang dilindungi, gua pantai
2	- Pelayanan - Navigasi - Transportasi	- Pelabuhan - Rambu navigasi - Feri penumpang
3	- Perikanan	- Budidaya perikanan pantai - Pengungkupan rumput laut dan kerang
4	- Industri pertambangan	- Pengerukan jalur pipa pasir/kerikil - Pengambilan karang, penambangan timah, produksi minyak dan gas
5	- Kegiatan yang mencemari lingkungan	- Saluran pembuangan limbah, limbah industri, erosi pantai, sedimentasi
6	- Penelitian Kelautan Meteorologi	- Ekosistem laut

Sumber : *Jurnal Perikanan dan Kelautan, Titaley, dkk., 2022.*

2.3.1 Konservasi dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Kawasan pesisir di Indonesia menyimpan beragam sumber daya alam yang melimpah, mulai dari komoditas perikanan, ekosistem terumbu karang, hutan bakau, hingga potensi lainnya. Namun, besarnya potensi ini berbanding lurus dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, apalagi di tengah kompetisi

global yang kian ketat. Upaya pelestarian kawasan pesisir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya mereka yang bermukim dan menggantungkan hidupnya pada wilayah tersebut. Hal ini disebabkan kehidupan komunitas pesisir sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya laut dan kawasan pantai di sekitar mereka.

Eksplorasi sumber daya pesisir perlu diimbangi dengan upaya konservasi sebagai wujud tanggung jawab lingkungan. Langkah pelestarian kawasan pesisir menjadi krusial dalam menjamin keberlanjutan dan kelestarian ekosistem pantai. Komitmen ini tercantum dalam regulasi negara, yaitu UU RI Nomor 1 Tahun 2014 yang merevisi UU Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Regulasi ini mencerminkan ikhtiar pemerintah dalam mengintegrasikan aspek perlindungan, konservasi, dan utilisasi sumber daya pesisir sambil mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan biodiversitasnya. Tanggung jawab ini tidak semata-mata berada di pundak pemerintah—masyarakat pesisir sebagai pelaku utama aktivitas di wilayah tersebut dituntut untuk bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pertumbuhan populasi yang disertai intensifikasi berbagai aktivitas tidak hanya menciptakan kebutuhan akan lahan permukiman, tetapi juga mendorong eksploitasi sumber daya pesisir untuk keperluan pangan dan sosial kemasyarakatan. Ironisnya, pemanfaatan yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap keseimbangan ekosistem (Saputro dkk, 2023).

2.4 Tinjauan Tentang Konsep *Blue Economy*

2.4.1 Pengertian *Blue Economy*

Menurut pandangan Nurhayati yang dikutip Setyawati (2021), ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang mengubah paradigma lama yang bergantung pada eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan alam dan ekosistem. Pendekatan ini mengedepankan strategi pembangunan berkelanjutan melalui penerapan sistem ekonomi yang minim emisi karbon. Gunter Pauli tercatat sebagai pelopor yang mengenalkan terminologi ekonomi biru pada 2010 lewat karyanya berjudul "*The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs*". Pendekatan ini mengadopsi prinsip kerja ekosistem alami yang terus

mengoptimalkan efisiensi dalam mendistribusikan nutrisi dan energi tanpa menghasilkan pemborosan, demi mencukupi keperluan mendasar seluruh komponen dalam sistem tersebut. Fokus utama ekonomi biru terletak pada aspek inovasi dan kreativitas, mencakup diversifikasi produk, optimalisasi proses produksi, serta pengorganisasian pengelolaan sumber daya yang lebih baik

Ekonomi biru dipandang sebagai solusi efektif untuk menangani persoalan degradasi lingkungan dan tingkat kemiskinan yang kerap dihadapi komunitas di kawasan pesisir. Prinsip-prinsip dalam ekonomi biru disusun untuk menciptakan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor maritim dan perikanan. Fondasi ekonomi biru bertumpu pada pengembangan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dengan sasaran mempercepat pembangunan nasional secara signifikan. Konsep ini juga mengusung prinsip tanpa limbah supaya seluruh sumber daya yang diambil dari alam dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia. Sebagai ilustrasi, ketika nelayan menangkap ikan tuna, seluruh bagian ikan wajib diolah tanpa tersisa. Mulai dari kepala, ekor, daging, tulang, hingga darah harus diproses menjadi produk industri hilir yang memiliki nilai tinggi (Resta Setyawati dkk., 2022).

Ekonomi biru merupakan penyatuan dari rancangan industrialisasi perikanan yang sebelumnya diinisiasi oleh kementerian terkait. Industrialisasi perikanan adalah pola usaha yang dikembangkan secara berkesinambungan dengan orientasi terhadap pasar internasional. Salah satu persyaratan krusial produk yang dipasarkan secara global adalah kemampuan penelusuran asal-usul produk perikanan yang harus dijaga dengan mengutamakan keamanan biologis di setiap tahapan budidaya. Saat ini telah ada regulasi yang ditetapkan dalam perdagangan global hasil kesepakatan negara-negara produsen perikanan dunia, bahwa suatu produk perikanan dapat diterima di suatu negara apabila input budidaya (kualitas air, fasilitas), proses budidaya (penanganan penyakit, pakan), dan output budidaya (produk ikan dan limbah) dilaksanakan sesuai standar keamanan yang telah ditentukan. Ketentuan serupa berlaku pada aktivitas penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan, di mana prinsip HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) wajib diterapkan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar

(SNI) untuk menjamin mutu ikan baik dari segi input, proses, maupun output sesuai standar kualitas yang ditetapkan (Faizah & Ilma, 2014).

Sebagai pendekatan baru dalam pembangunan sektor maritim dan perikanan, ekonomi biru akan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang menciptakan keseimbangan antara pengelolaan ekosistem wilayah pesisir, peningkatan kesejahteraan komunitas pesisir, dan stabilitas ekonomi dalam rangka pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Berikut merupakan tiga fokus *Blue Economy* yang dikemukakan oleh Gunter Pauli yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini :

1. Ekologi

Ekonomi biru mengimplementasikan logika sistem ekologi, yaitu ekosistem secara alami bergerak menuju efisiensi optimal dalam mengalirkan nutrisi dan energi tanpa menghasilkan limbah untuk mencukupi kebutuhan mendasar, kemudian ekonomi biru menekankan pada inovasi dan kreativitas yang mencakup diversifikasi produk, efisiensi proses produksi, dan penataan sistem pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, ekonomi biru berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki akibat kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim serta menjamin perlindungan ekosistem dan keberlanjutan kekayaan alam, khususnya pada bidang kelautan dan perikanan dengan harapan terwujudnya energi terbarukan (Luturmas dkk., 2023).

2. Sosial

Tingkat kesejahteraan komunitas di kawasan pesisir pada masa kini masih tertinggal dibandingkan sektor-sektor lainnya, termasuk sektor pertanian darat. Kondisi masyarakat pesisir umumnya berada pada level ekonomi dan kesejahteraan yang rendah, dengan lingkungan permukiman yang belum tertata rapi dan cenderung kumuh. Mengingat kondisi tersebut, maka dalam perspektif jangka panjang, tekanan pada sumber daya pesisir akan semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi biru diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat jika pemerintah mampu memberikan pemberdayaan kepada

komunitas yang bermukim dan menggantungkan hidup di pesisir dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak nilai ekosistem yang ada (Prayuda dkk., 2019).

3. Ekonomi

Konsep ekonomi biru berusaha memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dengan meninggalkan praktik ekonomi berorientasi keuntungan jangka pendek dan mengadopsi ekonomi rendah karbon, sehingga model dan konsep ekonomi biru ini diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan antara ekosistem dan ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang merupakan konsekuensi dari aktivitas ekonomi. Dalam implementasinya, ekonomi biru tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi berlipat ganda karena melalui konsep ini limbah dapat diubah menjadi nilai ekonomis untuk menghasilkan produk lainnya. Hal ini dapat menjadi strategi yang tepat bagi Indonesia dengan menciptakan peluang kerja baru di sektor maritim dan upaya meningkatkan daya saing ekonomi serta memperbaiki pola ekonomi yang bersifat jangka panjang di wilayah pesisir (Prayuda dkk., 2019).

2.4.2 Dinamika *Blue Economy* serta Hambatan Implementasi

Konsep *Blue Economy* menekankan pengelolaan sumber daya laut secara bijak dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Namun, ketika konsep ini diterapkan di wilayah pesisir seperti Kelurahan Sukaraja, berbagai dinamika muncul karena kondisi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi yang saling memengaruhi. Oleh sebab itu, penerapan *Blue Economy* di wilayah ini tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga harus dilihat melalui situasi sosial-ekologis yang membentuk kehidupan masyarakat pesisir.

Dari sisi ekologis, masyarakat Sukaraja menghadapi kondisi lingkungan pesisir yang semakin tertekan. Pencemaran laut akibat sampah rumah tangga dan aktivitas sehari-hari membuat kualitas air menurun dan mengganggu keberadaan biota laut. Nelayan juga sering mengalami penurunan hasil tangkapan karena perubahan ekosistem yang tidak stabil. Selain itu, abrasi pantai dan perubahan garis pesisir

mengurangi ruang aktivitas masyarakat, sedangkan cuaca yang tidak menentu menyulitkan masyarakat memprediksi waktu melaut. Kondisi ekologis seperti ini menunjukkan bahwa lingkungan pesisir belum sepenuhnya mendukung penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam *Blue Economy*.

Dari aspek sosial, hambatan utama terletak pada pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap konsep *Blue Economy*. Banyak masyarakat belum mengenal istilah ini dan hanya menjalankan aktivitas melaut berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Pola perilaku tradisional yang telah lama dipraktikkan membuat perubahan menuju pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara cepat. Minimnya penyuluhan atau pendampingan dari pemerintah juga menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Selain itu, kesadaran lingkungan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terlihat dari kebiasaan membuang sampah ke pesisir atau laut yang berdampak pada kerusakan ekosistem.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, masyarakat pesisir juga menghadapi keterbatasan modal untuk meningkatkan alat tangkap atau beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nelayan masih banyak menggunakan alat tangkap sederhana sehingga produktivitas sulit ditingkatkan. Pendapatan yang tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi cuaca membuat masyarakat enggan mengambil risiko untuk mencoba alternatif usaha yang sejalan dengan prinsip *Blue Economy*. Selain itu, akses pasar yang terbatas dan ketergantungan pada tengkulak membuat harga jual hasil tangkapan sering kali rendah. Keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas penyimpanan dan tempat pendaratan ikan, turut menjadi hambatan dalam meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan laut.

Berdasarkan dinamika tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *Blue Economy* di Kelurahan Sukaraja masih menghadapi berbagai hambatan ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Lingkungan yang belum stabil, pemahaman masyarakat yang terbatas, dan kondisi ekonomi yang belum mendukung menunjukkan bahwa konsep *Blue Economy* membutuhkan dukungan yang lebih kuat dan terarah. Dengan demikian, implementasinya di wilayah pesisir tidak hanya

bergantung pada teori, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap kondisi lokal agar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melihat berbagai dinamika dan hambatan yang muncul dalam penerapan *Blue Economy* di Kelurahan Sukaraja, dapat dipahami bahwa keberhasilan konsep ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menentukan apakah konsep *Blue Economy* dapat diterapkan, tetapi juga berkaitan erat dengan sejauh mana masyarakat memahami dan merespons konsep tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat pesisir terhadap *Blue Economy*, baik sebagai gagasan maupun sebagai praktik yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Pemahaman ini menjadi dasar penting yang dapat menentukan kesiapan masyarakat dalam menerima dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di wilayah pesisir.

2.4.3 Pemahaman Masyarakat Pesisir terhadap Konsep *Blue Economy*

Pemahaman masyarakat pesisir terhadap konsep *Blue Economy* menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana pendekatan pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan. Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling dekat dengan sumber daya laut sehingga tingkat pengetahuan dan persepsi mereka berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, kajian mengenai pemahaman masyarakat tidak hanya melihat apakah mereka mengetahui istilah *Blue Economy*, tetapi juga bagaimana mereka memaknai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep *Blue Economy* pada dasarnya menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Namun, pemahaman terhadap konsep ini sering kali tidak merata di masyarakat pesisir karena berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, keterbatasan informasi, pola mata pencaharian tradisional, serta kebiasaan turun-temurun dalam mengelola sumber daya laut. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat pesisir masih memaknai pembangunan pesisir sebatas pada aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, tanpa mempertimbangkan aspek konservasi dan keberlanjutan.

Dalam melihat variasi pemahaman masyarakat, teori literasi lingkungan dapat digunakan sebagai landasan analisis. Literasi lingkungan menjelaskan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap lingkungan akan memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu keberlanjutan. Masyarakat dengan literasi lingkungan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami dampak jangka panjang dari eksploitasi sumber daya laut dan kurang terlibat dalam program pelestarian lingkungan. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang lebih baik biasanya lebih siap mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Selain dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pemahaman masyarakat pesisir juga berkaitan erat dengan pengalaman mereka terhadap problematika lingkungan yang terjadi di wilayahnya. Pencemaran, abrasi pantai, menurunnya kualitas perairan, dan ketidakpastian hasil tangkapan menjadi realitas yang mereka hadapi setiap hari. Situasi ini membuat sebagian masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga lingkungan, meski belum secara spesifik mengaitkan hal tersebut dengan konsep *Blue Economy*. Dengan demikian, pemahaman masyarakat berkembang tidak hanya melalui informasi formal, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan pesisir.

Melalui pendekatan struktural fungsional, pemahaman masyarakat mengenai konsep *Blue Economy* dapat dilihat sebagai bagian dari fungsi sosial yang memengaruhi keseimbangan sistem sosial-ekologis di wilayah pesisir. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik, maka praktik pemanfaatan sumber daya cenderung lebih berkelanjutan dan mendukung stabilitas lingkungan. Sebaliknya, pemahaman yang terbatas dapat menyebabkan praktik yang merugikan ekosistem dan mengganggu fungsi sosial masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, kajian mengenai pemahaman masyarakat pesisir terhadap konsep *Blue Economy* tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar penting untuk melihat kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai problematika pesisir serta dalam mendukung realisasi pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sukaraja.

2.5 Tinjauan Tentang Problematika Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Masyarakat di wilayah pesisir umumnya bergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama, sehingga perubahan kecil pada kondisi lingkungan dapat berdampak besar terhadap kehidupan mereka. Dahuri (2003) menjelaskan bahwa wilayah pesisir di Indonesia sering berada dalam tekanan karena aktivitas manusia yang meningkat, perubahan ekologis, dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Kondisi ini juga terjadi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, di mana problematika pesisir muncul dari berbagai aspek yang saling berkaitan, baik ekologis, sosial, maupun ekonomi.

1. Problematika Ekologis di Wilayah Pesisir

Secara ekologis, kerusakan lingkungan merupakan tantangan paling terlihat di wilayah pesisir Sukaraja. Sampah rumah tangga yang dibuang ke laut dan pesisir menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran ini membuat perairan menjadi keruh dan tidak lagi mendukung kehidupan biota laut yang menjadi sumber penting bagi nelayan. Selain itu, penurunan hasil tangkapan ikan yang dialami masyarakat Sukaraja menunjukkan adanya perubahan ekologis yang cukup serius. Nelayan sering mengeluhkan bahwa ikan semakin sulit ditemukan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan adanya degradasi habitat atau penurunan produktivitas laut.

Abrasi pantai juga menjadi masalah yang semakin sering terjadi di Sukaraja. Penyusutan garis pantai tidak hanya mengurangi ruang aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam permukiman yang berada dekat dengan garis pesisir. Perubahan cuaca yang sulit diprediksi menambah kesulitan bagi nelayan, karena aktivitas melaut menjadi lebih berisiko. Kondisi ekologis seperti ini memperlihatkan bahwa lingkungan pesisir Sukaraja memerlukan pengelolaan yang lebih serius agar tetap mampu mendukung kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

2. Problematika Sosial Masyarakat Pesisir

Permasalahan sosial juga menjadi bagian penting dari problematika pesisir. Masyarakat pesisir Sukaraja sebagian besar masih mengandalkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas melaut. Kusnadi (2009) menyebutkan bahwa masyarakat pesisir umumnya memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan pendidikan, sehingga pengetahuan mereka terkait pengelolaan pesisir berkelanjutan cenderung terbatas. Hal ini juga terlihat dari minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan laut. Kebiasaan membuang sampah ke laut menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan belum sepenuhnya terbentuk.

Selain itu, kepadatan permukiman pesisir di Sukaraja menimbulkan tantangan tersendiri terkait sanitasi, kebersihan, dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi permukiman yang padat membuat ruang gerak terbatas dan memperparah permasalahan lingkungan. Minimnya sosialisasi atau penyuluhan dari pihak terkait menyebabkan masyarakat belum memahami bahwa perilaku sehari-hari mereka memiliki dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan pesisir yang lebih terarah dan berkelanjutan.

3. Problematika Ekonomi Masyarakat Pesisir

Dari sisi ekonomi, kondisi masyarakat pesisir Sukaraja menunjukkan kerentanan cukup tinggi. Pendapatan nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan yang tidak selalu stabil. Penurunan jumlah ikan, cuaca buruk, dan keterbatasan alat tangkap membuat penghasilan masyarakat sering tidak menentu. Nelayan yang tidak memiliki modal untuk membeli peralatan lebih baik atau mencoba usaha lain mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan. Kondisi ini sejalan dengan Satria (2015) yang menyebutkan bahwa nelayan tradisional umumnya menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Ketergantungan pada tengkulak juga menjadi permasalahan ekonomi yang serius. Nelayan sering harus menjual hasil tangkapan dengan harga rendah karena tidak memiliki pilihan lain. Situasi ini membuat mereka berada pada

posisi tawar yang lemah. Selain itu, minimnya infrastruktur pendukung seperti tempat penyimpanan ikan, sarana rantai dingin, atau tempat pendaratan yang memadai semakin mempersempit peluang masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan. Dengan demikian, kondisi ekonomi masyarakat pesisir Sukaraja masih belum cukup kuat untuk mendukung penerapan konsep pembangunan yang menuntut kesiapan ekonomi.

4. Keterkaitan Problematika dengan Pengelolaan Berkelanjutan

Berbagai problematika di atas menunjukkan bahwa kondisi pesisir Sukaraja berada dalam situasi yang saling memengaruhi satu sama lain. Kerusakan lingkungan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, sementara kondisi ekonomi yang lemah membuat masyarakat sulit beradaptasi dengan pola pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Aspek sosial seperti minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran lingkungan juga mempercepat proses degradasi lingkungan pesisir.

UNEP (2011) menjelaskan bahwa pengelolaan pesisir yang berkelanjutan harus memperhatikan seluruh aspek tersebut secara terpadu agar mampu menciptakan kondisi yang stabil. Dengan memahami problematika ekologis, sosial, dan ekonomi di wilayah pesisir Sukaraja secara menyeluruh, dapat terlihat bahwa penerapan pendekatan seperti *Blue Economy* membutuhkan dukungan kuat dari berbagai pihak. Upaya pengelolaan berkelanjutan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan mendorong keberlanjutan lingkungan di masa depan.

2.6 Landasan Teori Struktural Fungsional

Pendekatan fungsionalisme merupakan salah satu kerangka teoretis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial di era modern. Tiga pemikir utama yang menjadi pelopor perspektif ini adalah August Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Konsep struktural fungsional banyak mengadopsi analogi dari ilmu biologi, yang memandang masyarakat serupa dengan makhluk hidup. Dalam pandangan ini, masyarakat terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantung satu sama lain, dan interdependensi ini penting

untuk mempertahankan kelangsungan sistem sosial tersebut. Sebagaimana pendekatan sosiologis lainnya, perspektif struktural fungsional juga mengedepankan pencapaian kestabilan dalam tatanan masyarakat. Gagasan teori struktural fungsional ini bermula dari pemikiran Emile Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan satu kesatuan utuh yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang berbeda-beda. Setiap elemen dalam sistem sosial memiliki peran khususnya masing-masing yang berkontribusi terhadap keseimbangan sistem secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut saling terkait dan menjalankan fungsinya, sehingga apabila salah satu elemen mengalami disfungsi, hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan (Rediansyah, 2019).

Pada penelitian ini, peneliti menghubungkan teori struktural fungsional dengan masyarakat pesisir sebagai subjek dalam penelitian ini, masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Dalam hal ini masyarakat menjadi bagian penting dalam sebuah ekosistem wilayah pesisir yang akan berdampak pada lingkungan yang pada akhirnya berkesinambungan antara manusia dan alam dalam upaya mengatasi problematika yang terjadi. Dalam hal ini, teori struktural fungsional dapat membantu menganalisis bagaimana *Blue Economy* yang berfokus pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam *sustainable development* dapat menjadi solusi masalah-masalah yang dialami masyarakat wilayah pesisir secara keseluruhan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arif Setiajaya dkk, 2023	Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Sukaraja)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Lingkungan I Kelurahan Sukaraja belum berjalan secara optimal, meskipun timbulan sampah tergolong rendah dan didominasi oleh sampah non-organik. Aspek pembiayaan dan retribusi telah berjalan dengan baik, namun peran serta masyarakat dan pengolahan sampah masih lemah akibat rendahnya pengetahuan, keterlibatan, serta minimnya sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan analisis strategi, kondisi ini didominasi oleh kelemahan internal tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan melalui keterlibatan stakeholder dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengelolaan sampah
2	M. Deswan Seperly, 2020	IMPLEMENTASI <i>BLUE ECONOMY</i> PADA SEKTOR KELAUTAN DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN NELAYAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Nelayan TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep <i>blue economy</i> di TPI Gudang Lelang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelestarian ekosistem laut, namun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan belum optimal karena hasil tangkapan cenderung menurun.

			Meskipun demikian, penerapan <i>blue economy</i> dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dan ekonomi syariah karena menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan kemaslahatan jangka panjang.
3	Nasir dkk, 2024	Optimalisasi <i>Blue Economy</i> untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Kepulauan Sangkarrang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepulauan Sangkarrang memiliki potensi besar dalam pengembangan <i>blue economy</i> , namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas masyarakat. Meski demikian, penerapan strategi ekonomi berkelanjutan berbasis inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi antarpihak berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dari penelitian terdahulu yang telah disampaikan pada tabel diatas, terdapat persamaan dan perbedaan yang ditemukan. Persamaan pada penelitian yang akan

dilakukan dan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan objek yang sama, yakni *Blue Economy* dalam penelitian yang menjadi pokok persoalan utama untuk diteliti . Lalu terdapat perbedaan dan pembaharuan dalam penelitian yang akan diteliti dari penelitian sebelumnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan melihat bagaimana jika konsep *Blue Economy* dapat diterapkan dalam mengatasi problematika masyarakat di wilayah pesisir pada Kelurahan Sukaraja sebagai solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat.

2.8 Kerangka Berpikir

Wilayah pesisir merupakan ruang sosial yang memiliki keterkaitan erat antara kondisi lingkungan, kehidupan sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks Kelurahan Sukaraja, masyarakat pesisir dihadapkan pada berbagai problematika yang saling berhubungan, meliputi degradasi lingkungan, kesejahteraan masyarakat yang belum optimal, serta kemiskinan yang bersifat struktural. Ketiga permasalahan tersebut membentuk satu kesatuan problematika masyarakat wilayah pesisir yang memengaruhi keberlanjutan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Degradasi lingkungan pesisir, seperti penurunan kualitas perairan dan pencemaran lingkungan, berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Kondisi lingkungan yang tidak terkelola dengan baik akan menurunkan produktivitas sumber daya pesisir dan memperbesar kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat memperkuat ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara jangka pendek, yang pada akhirnya turut mempercepat degradasi lingkungan.

Kemiskinan struktural yang dialami masyarakat pesisir memperlihatkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kelembagaan sosial. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang lemah dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran permasalahan lingkungan dan kesejahteraan. Dengan demikian, problematika wilayah pesisir tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai suatu sistem yang saling memengaruhi antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

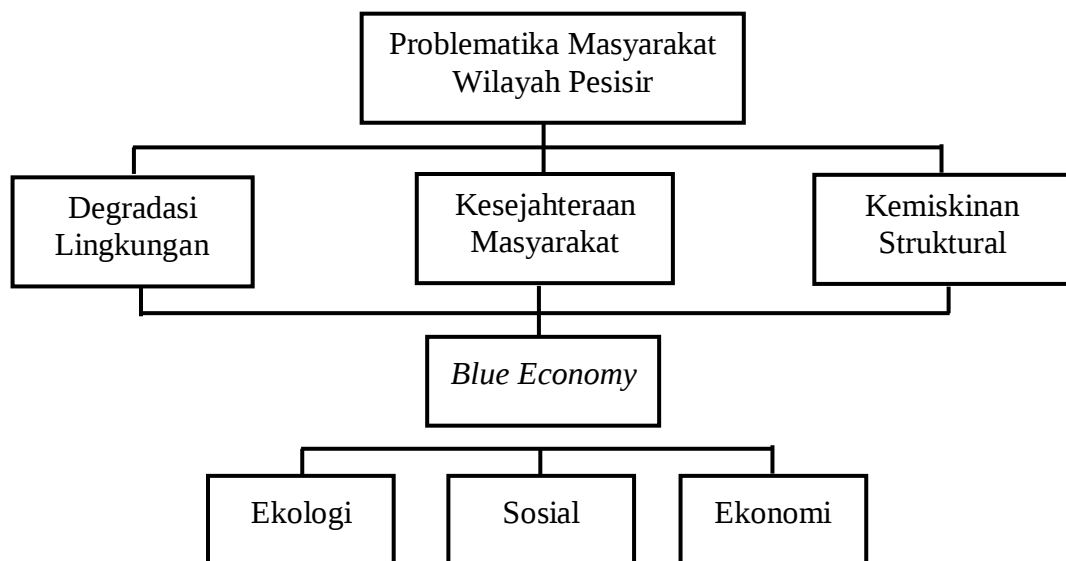
Sebagai upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan tersebut, konsep *Blue Economy* digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. *Blue Economy* dipahami sebagai pendekatan pembangunan pesisir yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan upaya pelestarian lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini menjadi landasan untuk menelaah bagaimana aktivitas

masyarakat pesisir dikelola dan sejauh mana prinsip-prinsip keberlanjutan telah diterapkan di wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja.

Dalam kerangka *Blue Economy*, penerapan pembangunan pesisir dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Aspek ekologi berkaitan dengan upaya menjaga dan mengelola lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Aspek sosial mencerminkan peran masyarakat dan kelembagaan sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sementara itu, aspek ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir serta upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya laut. Ketiga aspek tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai realisasi penerapan konsep *Blue Economy* serta pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut di wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji realisasi penerapan konsep *Blue Economy*, pemahaman masyarakat pesisir terhadap konsep tersebut, serta implikasinya dalam mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan struktural di wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



III.METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Fadli (2021) mengutip pendapat Walidin dkk yang menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan mengeksplorasi fenomena sosial dan kemanusiaan melalui penyusunan deskripsi komprehensif dan mendalam. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi verbal berdasarkan perspektif detail dari narasumber, dengan pengambilan data dilakukan pada kondisi natural atau alamiah.

Fokus kajian penelitian ini tertuju pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi komunitas di kawasan pesisir, khususnya mengenai persepsi dan respons mereka terhadap kebijakan Blue Economy. Konsep ekonomi biru ini dikaji sebagai alternatif pembangunan berkelanjutan yang berpotensi menjadi solusi bagi berbagai tantangan di Kelurahan Sukaraja, wilayah pesisir yang menjadi lokus penelitian. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana optimalisasi potensi sumber daya alam lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru untuk mengatasi problematika yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini, karena wilayah Kelurahan Sukaraja merupakan daerah pesisir yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan, namun terdapat banyak permasalahan seperti yang sebelumnya sudah disebutkan pada latar belakang penelitian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kelurahan Sukaraja terindikasi berbagai masalah sehingga menjadikan wilayah tersebut tidak dapat mengembangkan potensinya, yaitu karena aktifitas antropogenik dan faktor alam. Kelurahan Sukaraja juga merupakan daerah

yang potensial karena daerahnya berdekatan dengan berbagai akses fasilitas umum dan jalan utama yang memudahkan mobilitas masyarakat dalam menjual hasil laut dan masyarakat luar untuk dapat berkunjung kesana. Sebelumnya, juga peneliti pernah melakukan penelitian di daerah ini namun dengan topik penelitian berbeda, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat setempat dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami hubungan antara problematika masyarakat pesisir dan realisasi konsep *Blue Economy* sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian dibagi menjadi tiga bagian utama sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Pesisir terhadap Konsep *Blue Economy* dalam Konteks Problematika Wilayah Pesisir

Fokus ini menganalisis pemahaman masyarakat terhadap konsep *Blue Economy*, baik secara konseptual maupun substantif, serta mengkaji keterkaitannya dengan berbagai problematika pesisir seperti pencemaran, penurunan hasil tangkapan, dan ketidakstabilan pendapatan. Melalui pendekatan struktural fungsional, pemahaman masyarakat dianalisis sebagai bagian dari sistem sosial yang memengaruhi keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

2. Realisasi Konsep *Blue Economy* dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Problematika yang Dihadapi

Fokus ini menganalisis bagaimana konsep *Blue Economy* direalisasikan dalam praktik kehidupan masyarakat pesisir, meliputi aktivitas penangkapan ikan, distribusi hasil laut, pengelolaan lingkungan, dan relasi sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian mengidentifikasi hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi tingkat realisasinya. Pendekatan struktural fungsional digunakan untuk melihat fungsi dan ketidakseimbangan dalam sistem sosial pesisir.

3. Apa hambatan realisasi konsep *Blue Economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sukaraja

Fokus penelitian pada rumusan masalah ketiga diarahkan pada identifikasi hambatan dalam realisasi konsep Blue Economy dalam pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Sukaraja. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor penghambat yang muncul dalam aspek fasilitas dan sarana pendukung, keterbatasan akses permodalan masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan dukungan kelembagaan. Selain itu, fokus penelitian juga mencermati bagaimana hambatan-hambatan tersebut memengaruhi keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir dari dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis.

3.4 Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam memilih informan. Metode ini merupakan teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria khusus yang telah ditentukan peneliti (Sugiyono, 2016: 85). Pemilihan teknik *purposive sampling* ini dipandang tepat karena karakteristiknya yang sesuai dengan penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi hasil (Sugiyono, 2016: 85). Penggunaan teknik ini dalam menentukan informan dilandasi oleh pertimbangan bahwa metode tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan peneliti selama proses pengumpulan data, sehingga informan yang terpilih benar-benar relevan dengan tujuan dan fokus penelitian. Untuk jumlah informan yang terdapat sejumlah enam informan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya yang tinggal di Kelurahan Sukaraja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan dalam penelitian

NO	INFORMAN
1	Lurah
2	Staff Sekretaris Kelurahan
3	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Lampung
4	Ketua Kelompok Nelayan
5	Ketua Kelompok Nelayan
6	Nelayan

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan, sementara data sekunder digali dari tinjauan berbagai sumber literatur yang relevan.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui beberapa metode pengumpulan data:

a. Observasi

Pengamatan langsung dilakukan terhadap objek penelitian di lapangan untuk mengamati berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi. Metode ini melibatkan penggunaan indera secara sistematis dan terencana untuk memahami kondisi aktual masyarakat dan lingkungan sosial di Kelurahan Sukaraja di Kelurahan Sukaraja.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam untuk menggali informasi secara komprehensif dari para informan. Proses wawancara dilakukan secara fleksibel tanpa batasan waktu yang ketat. Apabila diperlukan klarifikasi atau data tambahan, peneliti akan melakukan wawancara lanjutan dengan informan yang sama untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan informasi yang diperoleh.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui pendokumentasian berbagai materi yang relevan dengan topik penelitian, termasuk dokumen tertulis, gambar fotografi, dan material lain yang dapat didokumentasikan untuk mendukung analisis penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta data visual berupa grafik, diagram, dan tabel yang memuat informasi penting untuk memperkuat analisis penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara Mendalam

Peneliti memilih wawancara mendalam dikarenakan pada penelitian ini dibutuhkan kedalaman informasi mengenai informan untuk dapat memenuhi pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian secara mendalam juga dipilih oleh peneliti karena dapat memperkaya data peneliti dalam mendapatkan informasi, wawancara secara mendalam dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti, lalu kembali bertanya ketika dalam jawaban narasumber terdapat ulasan-ulasan yang perlu dibahas sehingga data yang dimiliki bervariasi dan juga valid (Sugiyono, 2020).

Wawancara mendalam adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara tatap muka dengan partisipan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang pengalaman, pendapat, dan keyakinan mereka. Untuk melakukan wawancara mendalam, pewawancara harus menyiapkan serangkaian pertanyaan terbuka yang memungkinkan partisipan untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka secara bebas. Pewawancara juga harus membangun hubungan baik dengan peserta untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk berbagi informasi pribadi.

3.6.2 Observasi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipatif yang dilakukan secara tidak langsung sebagai salah satu pendekatan penelitian. Observasi non partisipatif yang dilakukan secara tidak langsung merupakan metode observasi di mana peneliti tidak terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati. Peneliti mengumpulkan data melalui sumber-sumber tidak

langsung, seperti dokumen, rekaman audio atau video, atau data statistik yang telah ada yang berkaitan problematika masyarakat di wilayah pesisir .

Data dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada, dan peneliti melakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh wawasan atau pemahaman yang diinginkan (Moleong, 2018). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data lapangan mengenai penerapan *Blue Economy* sebagai solusi bagi permasalahan yang dialami masyarakat di wilayah pesisir.

3.6.3 Dokumentasi

Dalam konteks penelitian kualitatif, dokumentasi dapat melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti arsip, catatan-catatan sejarah, laporan, kebijakan, surat-menyurat, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konteks penelitian, kebijakan atau regulasi terkait, sejarah peristiwa, catatan-catatan penting, atau informasi lain yang relevan. Data dari dokumen dapat dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan atau didapat terkait dengan kajian penerapan konsep *Blue Economy* dalam pembangunan berkelanjutan wilayah laut dan pesisir yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data

No	Tujuan Penelitian	Metode Pengumpulan Data
1	Mengetahui pemahaman masyarakat pesisir terhadap istilah <i>Blue Economy</i> serta problematika yang muncul dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Kelurahan Sukaraja.	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
2	Menganalisis realisasi konsep <i>Blue Economy</i> dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan sumber daya pesisir serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam penerapannya di Kelurahan Sukaraja.	Observasi, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi

3	Menganalisis dan merumuskan strategi penanganan problematika masyarakat wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja dalam kerangka konsep Blue Economy guna mendorong realisasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.	Observasi, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan cara membaca, memahami, dan mengekstraksi informasi yang relevan. Data kemudian dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu. Setelah itu, data dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori dan konsep yang terkait dengan problematika masyarakat di wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan dari berbagai kalangan masyarakat, pengolahan data dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa memilah serta meringkas data. Dalam hal ini setelah peneliti melaksanakan pengumpulan data kemudian menggolongkan Kembali ke tiap-tiap permasalahan lalu setelahnya bisa ditarik kesimpulan. Reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi berupa foto kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh data yang diinginkan.

2. Verifikasi dan Validasi

Dalam penelitian ini, verifikasi dan validasi data dapat melibatkan perbandingan dengan sumber data lain, konsultasi dengan ahli, atau melibatkan *stakeholder* untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menampilkan informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara efektif kepada pembaca atau audiens yang dituju. Dalam penelitian ini, data disajikan melalui teks analisis deksriptif, dan data relevan dengan tujuan penelitian dengan menggunakan table atau narasi yang sesuai untuk menggambarkan temuan utama penelitian.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Setelah analisis data selesai, hasilnya perlu diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan penelitian. Interpretasi data harus dilakukan dengan hati-hati dan mengacu pada tujuan penelitian atau kajian yang telah ditetapkan. Kesimpulan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau informasi yang dapat digunakan dalam kajian penelitian yang dilakukan. Kesimpulan disajikan dengan menggambarkan temuan utama penelitian dan implikasinya terhadap topik penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Sukaraja

4.1.1 Sejarah Kelurahan Sukaraja

Sukaraja adalah satu dari beberapa kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Menurut informasi statistik kelurahan, kawasan ini memiliki area sekitar 80,3 hektare. Pada awalnya, Sukaraja berbentuk desa yang dihuni oleh warga Lampung dari Semaka dan Kota Agung, serta berada di bawah administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat mendorong masyarakat setempat mengadakan pertemuan untuk menentukan pemimpin dan penamaan wilayah mereka. Melalui hasil musyawarah tersebut, ditetapkan nama Sukaraja dengan Batin Rajo Ugokh sebagai kepala kampung pertama. Dalam perjalanan sejarahnya, area Kampung Sukaraja terus berkembang hingga mencapai kawasan Garuntang. Transformasi status dari kampung menjadi kelurahan terjadi pada tanggal 1 Januari 1981 dan berlaku sampai sekarang.

Dalam perjalanannya, Kelurahan Sukaraja telah mengalami beberapa pergantian pimpinan, baik Kepala Kampung maupun Lurah, yang dibantu oleh sekretaris kelurahan untuk mengelola administrasi. Struktur organisasi pemerintahan kelurahan ini terdiri dari berbagai seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketertiban dan Ketentraman, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kepala Lingkungan yang masing-masing menjalankan tanggung jawab sesuai bidangnya.

4.1.2 Kependudukan di Kelurahan Sukaraja

Kondisi kependudukan dan pendidikan masyarakat Kelurahan Sukaraja menjadi aspek penting dalam memahami dinamika sosial-ekonomi wilayah pesisir ini. Berdasarkan data administrasi tahun 2024, jumlah penduduk Kelurahan Sukaraja mencapai 10.007 jiwa, terdiri dari 5.051 laki-laki dan 4.956 perempuan. Komposisi

ini menunjukkan keseimbangan gender yang relatif stabil serta potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Ditinjau dari struktur usia, kelompok usia produktif (17–54 tahun) merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 2.916 jiwa, yang menegaskan karakter masyarakat yang masih sangat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Berikut komposisi penduduk berdasarkan umur yang didapat dari data administrasi Kelurahan Sukaraja tahun 2024 :

Tabel 4.1 Data Penduduk Sukaraja Berdasarkan Umur Tahun 2024

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 tahun	254	267	523
2	5 -6 tahun	403	444	847
3	7 – 13 tahun	376	435	811
4	14 – 116 tahun	378	466	844
5	17 – 21 tahun	1.026	813	1.839
6	25 – 54 tahun	1.890	1.870	3.760
7	55 ke atas	723	661	1.384
	Jumlah	5.051	4.956	10.007

Sumber : *Data Primer Penelitian, 2024*

Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari beberapa etnis berbeda seperti Lampung, Banten, Aceh, Minang, Sunda, Jawa, Bugis Cina, Sumatera Selatan dan beberapa etnis lainnya, namun untuk persentase jumlah distribusi penduduk berdasarkan etnis tersebut belum terdata pada data administrasi Kelurahan Sukaraja.

Pendidikan menjadi hal yang penting bagi suatu daerah untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu daerah, karena pendidikan dapat memengaruhi cara seseorang dalam bertindak dan menentukan sesuatu dalam kesehariannya. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap individu, maka dari itu pendidikan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 28 C ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut Gambaran penduduk Sukaraja berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 4.3 Data Pendidikan Penduduk di Kelurahan Sukaraja Tahun 2025

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana	262	112	374
2	Sarjana Muda	291	218	509
3	SLTA	920	750	1.650

4	SLTP	808	801	1.609
5	SD	1.778	1.898	3.676
6	TK	320	301	621
7	BS	672	896	1.568
8	Buta Huruf	-	-	-
	Jumlah	5.051	4.956	10.007

Sumber : *Data Primer Penelitian, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.3, tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sukaraja masih didominasi tamatan Sekolah Dasar (3.676 orang), kemudian SLTP, SLTA, dan hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan tinggi. Dominasi pendidikan rendah ini berdampak pada pola pikir masyarakat, terutama dalam memahami konsep pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Dalam wawancara, informan AO menjelaskan bagaimana keterbatasan pendidikan memengaruhi cara masyarakat memaknai laut:

“Banyak warga kita yang sekolahnya tidak tinggi. Jadi pandangannya tentang laut itu hanya sebatas tempat mencari nafkah cepat. Soal menjaga lingkungan atau cara tangkap yang lebih baik, itu masih dianggap tidak penting.”

(AO, Wawancara, 12 Agustus 2024)

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan masyarakat memahami isu-isu seperti keberlanjutan sumber daya, pelestarian ekosistem pesisir, serta pemanfaatan laut secara efisien sesuai prinsip *Blue Economy*. Konsep *Blue Economy* hanya akan efektif apabila masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan memadai untuk menerima dan menerapkan pola pengelolaan baru yang lebih ramah lingkungan.

Keterbatasan pendidikan masyarakat juga berdampak pada penerimaan teknologi baru dalam bidang perikanan, seperti penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, sistem penyimpanan modern, atau pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran hasil laut. Banyak nelayan tetap bergantung pada metode tradisional karena keterbatasan kemampuan adaptasi terhadap inovasi. Sebagaimana dikatakan informan JS:

“Kalau ada alat baru atau pelatihan, tidak semua mau ikut. Katanya takut tidak bisa mengoperasikan atau tidak mengerti cara pakainya. Jadi yang dipakai tetap cara lama.”

(JS, Wawancara, 17 Juli 2024)

Kutipan ini menunjukkan adanya hambatan kognitif dan teknis yang bermula dari rendahnya tingkat pendidikan, sehingga menghambat transformasi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam konteks penelitian ini, kondisi kependudukan dan pendidikan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan problematika pesisir. Rendahnya pendidikan memperburuk pemahaman terhadap aspek ekologis, sosial, dan ekonomi yang menjadi pilar utama *Blue Economy*. Selain itu, komposisi penduduk usia produktif yang besar namun kurang terdidik menyebabkan potensi sumber daya manusia tidak berkembang secara optimal dan justru terjebak dalam pekerjaan berisiko seperti buruh nelayan atau pekerjaan informal lainnya.

Dengan demikian, integrasi antara data kependudukan dan pendidikan memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik masyarakat Sukaraja. Gambaran ini menjadi landasan penting dalam memahami konteks sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesiapan masyarakat pesisir dalam menerima pendekatan *Blue Economy* sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Upaya implementasi *Blue Economy* memerlukan peningkatan kapasitas pendidikan, pendampingan berkelanjutan, serta peran aktif pemerintah dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan pesisir.

Struktur demografis yang didominasi kelompok usia produktif sebenarnya dapat menjadi potensi besar dalam pengembangan ekonomi pesisir. Namun, potensi tersebut tidak dapat terwujud optimal karena sebagian besar masyarakat hanya memiliki pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir. Hal ini dikemukakan oleh informan RA:

“Warga di sini sebenarnya masih muda-muda dan kuat, tapi kalau bicara soal pengetahuan atau cara baru dalam mengelola sumber daya laut,

banyak yang belum paham. Mereka takut salah atau merasa itu bukan untuk mereka.”

(RA, Wawancara, 19 Agustus 2024)

Keterbatasan pendidikan juga menyebabkan rendahnya literasi tentang konservasi pesisir serta kurangnya kemampuan untuk mengadopsi inovasi yang sebenarnya dapat mendukung pekerjaan nelayan. Misalnya, banyak nelayan yang enggan menggunakan teknologi pendukung seperti GPS dan sonar, padahal alat tersebut dapat meningkatkan efisiensi waktu dan jarak melaut. Informan M mengungkapkan:

“Ada alat bantuan dari dinas sebenarnya, tapi banyak yang tidak dipakai. Katanya ribet dan mereka tidak yakin bisa mengoperasikan. Jadi tetap pakai cara lama, pakai feeling dan lihat arah angin.”
(M, Wawancara, 6 Agustus 2024)

Situasi ini menjadi salah satu faktor mengapa pendapatan nelayan sering kali tidak stabil. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman teknologi berdampak pada kemampuan nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca dan kondisi laut. Beberapa informan menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hasil tangkap ikan menurun drastis sehingga nelayan harus melaut lebih jauh dan menghabiskan waktu lebih lama di laut. Seorang nelayan, informan M menjelaskan:

“Sekarang ikan makin jauh. Kadang berangkat pagi pulanginya malam baru dapat sedikit.”

“Kalau tidak kuat modal solar, ya tidak bisa berangkat.”
(M, Wawancara, 6 Agustus 2024)

Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi buruh atau pedagang, karena penghasilan dari melaut tidak lagi dapat diandalkan. Kondisi ini menandai adanya perpindahan pekerjaan dari pekerjaan tradisional nelayan ke sektor informal yang dianggap lebih memberikan kepastian pendapatan harian.

Rendahnya tingkat pendidikan juga memperkuat ketergantungan masyarakat pada struktur sosial yang tidak menguntungkan, terutama hubungan nelayan kecil terhadap juragan dan tengkulak. Ketergantungan ini tidak hanya dalam konteks

pemasaran hasil tangkap, namun juga dalam hal permodalan. Informan M mengungkapkan:

“Kalau mau melaut, banyak yang pinjam modal ke juragan. Otomatis nanti hasilnya harus dijual ke mereka. Mau harga murah pun tidak bisa menolak, karena sudah hutang.”

(M, Wawancara, 6 Agustus 2024)

Keterikatan struktural ini membuat nelayan sulit mandiri secara ekonomi dan tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan harga jual. Ketika dikaitkan dengan prinsip *Blue Economy*, kondisi semacam ini menjadi kendala serius karena *Blue Economy* menuntut partisipasi aktif masyarakat, kemampuan membaca peluang ekonomi baru, serta pengelolaan sumber daya laut secara efisien. Namun, selama masyarakat masih berada dalam hubungan patronase dengan tengkulak, upaya pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan menjadi sulit diwujudkan.

Selain itu, dari aspek kependudukan, padatnya permukiman pesisir juga berdampak pada kondisi lingkungan yang semakin menurun. Banyaknya sampah rumah tangga yang mencemari perairan menyebabkan kualitas ekosistem laut menurun, sehingga berdampak pada kelimpahan ikan. Informan J menuturkan:

“Air laut sekarang sudah tidak sejernih dulu. Banyak sampah yang terbawa arus ke tempat kami melaut. Ikan-ikan kecil banyak hilang. Dulu dekat saja sudah dapat, sekarang harus ke tengah.”

(J, Wawancara, 18 Juli 2024)

Temuan ini memperkuat data penelitian bahwa degradasi lingkungan merupakan salah satu penyebab utama menurunnya produktivitas nelayan. Ketika pendidikan rendah dan tidak ada kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan, maka masalah ekologis tidak dapat diatasi secara signifikan.

Lebih jauh lagi, temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami hubungan antara pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, yang merupakan inti dari konsep *Blue Economy*. Informan J menyampaikan:

“Kalau soal Blue Economy itu sebenarnya belum banyak yang mengerti. Yang dipikir warga ya selama bisa ambil ikan, itu sudah cukup. Belum

sampai ke pemahaman soal masa depan laut.”
(J, Wawancara, 18 Juli 2024)

Kutipan ini menunjukkan bahwa upaya menerapkan *Blue Economy* membutuhkan langkah awal berupa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, serta pendampingan dari pemerintah dan lembaga terkait. Tanpa peningkatan pemahaman masyarakat, *Blue Economy* hanya akan menjadi konsep normatif tanpa realisasi nyata di lapangan.

Dengan demikian, kondisi kependudukan dan pendidikan masyarakat Kelurahan Sukaraja memberikan gambaran menyeluruh mengenai akar persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sosial-ekonomi, rendahnya pendidikan, penurunan kualitas lingkungan, ketergantungan pada tengkulak, serta kurangnya pemahaman tentang keberlanjutan merupakan faktor utama yang membentuk problematika masyarakat pesisir Sukaraja.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Realisasi Konsep *Blue Economy* dalam Mengatasi Problematika Masyarakat Wilayah Pesisir Kelurahan Sukaraja menunjukkan bahwa dinamika pembangunan pesisir tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang membentuk suatu sistem sosial yang kompleks. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep *Blue Economy*

Pemahaman masyarakat pesisir Kelurahan Sukaraja terhadap konsep *Blue Economy* masih terbatas secara terminologis, karena sebagian besar masyarakat belum mengenal istilah tersebut secara formal. Namun demikian, secara substantif nilai-nilai keberlanjutan telah tumbuh dalam praktik keseharian mereka. Masyarakat menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut, memanfaatkan hasil tangkapan secara efisien, serta memahami bahwa kerusakan lingkungan berdampak langsung pada penurunan pendapatan.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan praktik empiris. Dalam perspektif struktural fungsional, kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem sosial masyarakat pesisir telah memiliki fungsi adaptif terhadap lingkungan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan dan kelembagaan yang terstruktur.

2. Realisasi Konsep *Blue Economy* dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

Realisasi konsep *Blue Economy* di Kelurahan Sukaraja masih bersifat parsial dan belum terimplementasi secara menyeluruh. Pada aspek ekologi, terdapat kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan, tetapi belum didukung oleh regulasi dan pengawasan yang konsisten. Pada aspek

ekonomi, ketergantungan terhadap tengkulak, minimnya fasilitas pengolahan dan penyimpanan, serta keterbatasan akses modal menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah hasil laut belum optimal. Sementara pada aspek sosial, meskipun solidaritas masyarakat relatif kuat, ketimpangan distribusi bantuan dan lemahnya koordinasi kelembagaan berpotensi mengganggu integrasi sosial. Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur sosial dan kelembagaan belum berfungsi secara optimal dalam mendukung keberlanjutan pembangunan pesisir. Realisasi Blue Economy masih menghadapi hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

3. Hambatan Realisasi Konsep *Blue Economy* dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kelurahan Sukaraja

Hambatan dalam realisasi konsep Blue Economy di Kelurahan Sukaraja terutama terletak pada keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung pengelolaan pesisir, terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan dukungan kelembagaan. Keterbatasan tersebut menghambat penguatan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya pesisir dan memperlambat integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik pengelolaan lingkungan dan sosial. Meskipun masyarakat telah menunjukkan praktik keberlanjutan secara intuitif, kurangnya dukungan struktural dan sinergi antaraktor menyebabkan penerapan konsep Blue Economy belum berjalan secara optimal dalam mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realisasi konsep *Blue Economy* dalam mengatasi problematika masyarakat wilayah pesisir Kelurahan Sukaraja, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi kebijakan pembangunan pesisir berbasis *Blue Economy* secara terencana dan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada bantuan

fisik, tetapi juga harus disertai dengan penguatan kapasitas melalui pelatihan pengolahan hasil laut, manajemen usaha, serta akses terhadap teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, diperlukan transparansi dan pemerataan distribusi bantuan guna menghindari ketimpangan sosial antar kelompok nelayan. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dari aktivitas industri dan limbah rumah tangga juga perlu ditingkatkan melalui regulasi yang tegas dan koordinasi lintas sektor.

2. Bagi Masyarakat dan Kelompok Nelayan

Masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan kerja sama kolektif dalam pengelolaan sumber daya laut. Kelompok nelayan perlu meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembangkan diversifikasi usaha serta meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan. Kesadaran ekologis yang telah tumbuh perlu diarahkan menjadi praktik yang lebih sistematis dan terorganisir, sehingga tidak hanya bersifat sporadis, tetapi menjadi budaya kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

3. Bagi Lembaga Kelembagaan dan Pemangku Kepentingan

Lembaga kelurahan, kelompok nelayan, serta dinas teknis perlu membangun forum komunikasi yang berkelanjutan sebagai wadah koordinasi dan penyelesaian masalah bersama. Penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan sistem sosial pesisir agar fungsi adaptasi, integrasi, dan pencapaian tujuan dapat berjalan optimal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi *Blue Economy* secara komprehensif.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai model implementasi *Blue Economy* berbasis komunitas, termasuk analisis kuantitatif mengenai dampak ekonomi dan lingkungan. Studi komparatif antar wilayah pesisir juga diperlukan untuk melihat

variasi realisasi konsep Blue Economy dalam konteks sosial yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis terhadap dinamika kekuasaan dalam rantai distribusi hasil laut, khususnya relasi antara nelayan dan tengkulak, sebagai bagian dari upaya penguatan sistem ekonomi pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muhith, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, (Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1, 2018), hal 47
- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). *The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. Marine Policy*, 25(5), 377–388.
- Banu, N. M. (2020). Konsep *Blue Economy* Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1).
- Béné, C., Godfrey Wood, R., Newsham, A., & Davies, M. (2012). *Resilience: New utopia or new tyranny? Reflection about the potentials and limits of the concept of resilience in relation to vulnerability reduction programmes. IDS Working Papers*, 2012(405), 1–61.
- Boy Anugerah. (2021). Pembinaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan di Indonesia dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nasional. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 253–266. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.211>
- Chambers, R. (1994). *The origins and practice of participatory rural appraisal. World Development*, 22(7), 953–969.
- Diposaptono, S. D. (2003). Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dalam Kerangka Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia. *Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana*, 8(2), 195603.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Faizal, I., Purba, N. P., Khan, A. M., & Yebelanti, A. (2021). Persepsi masyarakat terkait isu sampah pada ekosistem dan perairan di kecamatan Muara Gembong. *Jurnal Berdaya*, 1(1), 1-9.
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1).
- Firaiza, I., & Taher, A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Gerakan Sayang Ibu (Studi di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(3).
- Gumilar, I. (2012). Partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuatika*, 3(2).

- Harun, S. (2024). Optimalisasi Blue Economy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Kepulauan Sangkarrang. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 10-10.
- Herawati, A. R., Gatot Suprpto, S. E., & Wahono, J. D. (2019). Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Garda Terdepan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Journal Of Public Policy And Applied Administration*, 1(2).
- Ibrahim, N. M. N. (2022). *Infrastruktur Persampahan Dalam Menunjang Pelestarian Lingkungan Di Kawasan Permukiman Pesisir Pulau Salemo Kabupaten Pangkep= Waste Infrastructure In Supporting Environmental Conservation In The Coastal Settlement Area Of SALEMO ISLAND, PANGKEP REGENCY* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ilma, A. F. N. (2014). *Blue Economy: kesimbangan perspektif ekonomi dan lingkungan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1).
- Kabalu, F., Durand, S. S., Kotambunan, O. V., Manoppo, V. E., & Andaki, J. A. (2022). Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Mangrove Di Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 10(2), 277-285.
- Khan, Alexander MA, Imam Musthofa, Indarwati Aminuddin, Fitri Handayani, Ratna N. Kuswara, and Ajeng Wulandari. "Wisata Kelautan Berkelanjutan di Labuanbajo, Nusa Tenggara Timur: Sebuah Study Tentang Persepsi Masyarakat Kawasan Pesisir." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 7, no. 1 (2020): 52-76.
- Kinicki Angelo. Roberr Kreitner, (2003). *Organizational Behavior Key Concepts, Skills & BestPracttces* \1c. Grau Hill Boston.
- Kristian, I. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Rasi*, 1(1), 49-63.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal ilmiah platax*, 1(2), 92-101.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nomor, P. P. (16). Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. *Lampiran I pada subbab*, 5, 32.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Ompusunggu, S. M., Sarmita, I. M., & Wesnawa, I. G. A. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Ekonomi dan Dampaknya bagi Lingkungan Pantai (Studi Kasus: Pantai Penimbangan). *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 11(1), 18-23.

- Paramita, A., & Kristiana, L. (2013). Teknik focus group discussion dalam penelitian kualitatif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 16(2), 117-127.
- Pauli, G. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm Publications.
- Rante, I. (2021). Persepsi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Biak Timur Kabupaten Biak Numfor: Perceptions of Coastal Communities in Mangrove Forest Management in East Biak, Biak Numfor Regency. *Jurnal Perikanan Kamasan: Smart, Fast, & Professional Services*, 2(1), 44-66.
- Rusdy, N., & Mansur, U. (2021, July). Implementasi Konsep *Blue Economy* Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Masa New Normal. In *SENAKOTA: Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 1, No. 1, pp. 75-82).
- Santoso, D. H. (2020). Valuasi Ekonomi Degradasi Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 12(2), 121-130.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Y. S. Suryandari, Ed.; Cetakan Ke). Alfabeta.
- Sardia, S. (2021). *Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sari, D. P., Nugroho, I., & Rachmawati, R. (2020). Implementasi blue economy dalam pembangunan wilayah pesisir. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(2), 123–135.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Seperly, M. D. (2016). Implementasi Blue Economy Pada Sektor Kelautan Dalam Upaya Mensejahterakan Nelayan Perspektif Ekonomi Syari'ah.
- Setiajaya, A., Hasiany, S., & Zulaicha, A. S. (2023). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Sukaraja). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 807-818.
- Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Kota Sabang. *Jurnal Education And Development*, 9(4), 178-185.
- Sidik, (2022). Tarakan, P. D. K. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. [Jureka: Vol 1 No 1 \(2022\): Vol 1, No. 01, Tahun 2022](#)
- Simbolon, M. (2007). Persepsi dan kepribadian. *Jurnal ekonomis*, 1(1), 52-66.
- Suryanti, S., Supriharyono, S., & Anggoro, S. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

- Titaley, Y. M., Jacobus, S. I., & Lahaji, Z. (2022). Identifikasi Daya Dukung Pengelolaan Pesisir Pantai Di Distrik Nabire Kabupaten Nabire. *TABURA: Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 4(1), 8-17.
- Wahyuni, S. (2019). *Qualitative Research Method: Theory and Practice* (3th editio). Jakarta : Salemba Empat.
- Wibisono, W., & Hut, S. Strategi Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung Dari Bahaya Banjir Rob (Studi Kasus: Kelurahan Kangkung, Kelurahan Bumiwaras dan Kelurahan Sukaraja). *Institut Teknologi Sumatera*. Diakses pada <http://repo. itera. ac. id>.
- Yonvitner, S. P., Susanto, H. A., & Pi, S. (2016). Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut*, 1-39.